

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, maka disusun kesimpulan untuk persoalan dari rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Pengaturan dan prosedur permintaan izin pemeriksaan bagi pejabat-pejabat tertentu dalam penyidikan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut: Tata cara pemeriksaan Kepala Daerah berdasarkan pasal 90 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden RI, dengan tata cara sebagai berikut: Penyidik mengajukan surat permohonan persetujuan tertulis untuk memeriksa Kepala Daerah / Wakil kepada Presiden / Menteri Dalam Negeri, Untuk Anggota DPR Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden Dewan sesuai Pasal 245 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU MD3. Permohonan harus menyebutkan siapa tersangkanya. Sebelum mulai pemeriksaan, terlebih dahulu dokumen asli persetujuan tertulis Presiden diperlihatkan / untuk dibaca diperiksa. Hak khusus yang dijamin undang-undang untuk menjaga harkat dan martabat pejabat-pejabat tertentu agar tidak

diperlakukan secara tidak baik dan sewenang-wenang ketika dilakukan proses penyidikan. Akan tetapi, suatu tindakan penyidikan yang dilakukan dengan tidak mengindahkan ketentuan formal maupun material akan memberikan celah-celah hukum kepada tersangka untuk lolos dari tanggung jawab hukum, hal ini tentunya akan memberikan penilaian negatif terhadap keseriusan, kredibilitas dan profesionalisme penyidik, melawan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, adalah bagaimana seorang Penyidik dapat menyusun strategi guna menjerat tersangka sesuai perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.

2. Kaitan prinsip *Equality before the law* (persamaan di hadapan hukum) dengan izin pemeriksaan pejabat-pejabat tertentu :

a. Proses pemanggilan dan pemeriksaan yang cukup panjang dilakukan oleh penyidik agar dapat melakukan penyidikan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana akan mempengaruhi hasil dari penyidikan tersebut. Izin Presiden atau Menteri Dalam Negeri akan berpotensi menghambat penegakan hukum karena izin Presiden bisa diberikan bahkan bisa ditolak / tidak mendapat tanggapan.

b. Berpotensi menghambat proses penyidikan dalam penegakan hukum karena mekanisme izin dari Presiden atau Menteri Dalam Negeri yang lama tidak sesuai dengan prinsip *due process of law*, bahwa negara hukum menjunjung tinggi supremasi hukum yakni proses peradilan seharusnya sesuai dengan asas bersifat cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Perlunya izin Presiden untuk

melakukan penyidikan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi persamaan, perlakuan, kepastian dan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia.

## B. Saran

Berdasarkan dari hasil analisis penelitian dan pembahasan ini, maka dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Proses penyidikan terhadap anggota DPR dan Kepala Daerah harus sama dengan warga negara biasa dan penyidik tidak harus izin Presiden atau Menteri Dalam Negeri, sehingga aspek-aspek negara hukum terwujud untuk melindungi hak setiap warga negara baik dari sisi *due process of law* maupun *equality before the law*.
2. Agar Pejabat yang berwenang dalam membuat Undang-undang melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan asas *Equality Before The Law* sehingga kewenangan Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap anggota DPR dan Kepala Daerah tidak terhambat guna mempercepat proses peradilan. Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan dapat optimal dan tidak terbelenggu dalam menjalankan tugas dan fungsi penegakan hukum.